



Implementasi Strategi Perkembangan Sistem Ekonomi Berbasis Pancasila di Era Modern

Yusuf Hamdani^{1*}, Arisa Oktaviana Maharani², Supriyono³

¹⁻³Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Email: yusufhamdani2005@upi.edu¹, risaarisaoktavianam@upi.edu², supriyono@upi.edu³

*Penulis Korespondensi: yusufhamdani2005@upi.edu

Abstract. *The birth of the modern era brings positive and negative influences so that nations that are unable to utilize it properly will experience economic inequality in society. There are negative economic influences whose implementation is not based on Pancasila, resulting in low resistance to external influences that prioritize material needs and give rise to greed. This happens because it has not fully implemented the values of Pancasila into the national economy in the modern era. Economic improvement in the modern era is increasingly important to improve people's welfare. Efforts to improve the economy must be fair and prioritize the interests of society, so that everyone can enjoy it. To build harmony in improving the Indonesian economy, it is necessary to implement an economic system development strategy based on Pancasila. Pancasila economics is a concept of thinking about planning in the implementation of the national economy within a framework based on the implementation of the values contained in the Pancasila paradigm. The method we use is qualitative. The aim of developing economic growth is to produce broad employment opportunities without inequality.*

Keywords: *Economic Growth; Economic Inequality; Modern Era; Pancasila Economics; People's Welfare.*

Abstrak. Era modern lahir membawa pengaruh positif dan negatif sehingga bangsa-bangsa tidak mampu memanfaatkannya dengan baik akan mengalami kesenjangan ekonomi di masyarakat. Adanya hal negative pengaruh ekonomi yang penerapannya kurang berdasarkan Pancasila, mengakibatkan rendahnya resistensi terhadap pengaruh luar yang mengutamakan kebutuhan materi dan menimbulkan keserakahan. Hal ini terjadi karena itu belum sepenuhnya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam perekonomian nasional di era modern. Perbaikan perekonomian di era modern semakin penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya peningkatan perekonomian harus berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat, sehingga semua orang bisa menikmatinya. Untuk membangun keselarasan perbaikan perekonomian Indonesia adalah dengan menerapkannya strategi pengembangan sistem perekonomian berdasarkan Pancasila. Ekonomi Pancasila merupakan suatu konsep pemikiran tentang perencanaan dalam penyelenggaraan perekonomian Nasional dalam kerangka berdasarkan implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam paradigma Pancasila. Itu metode yang kami gunakan adalah kualitatif. Tujuan dari pengembangan pertumbuhan ekonomi ini adalah untuk menghasilkan hasil yang luas kesempatan kerja tanpa ketimpangan.

Kata Kunci: Ekonomi Pancasila; Era Modern; Kesejahteraan Masyarakat; Ketimpangan Ekonomi; Pertumbuhan Ekonomi.

1. LATAR BELAKANG

Negara-negara modern memiliki tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Pembangunan ekonomi merupakan peningkatan kapasitas produktif suatu perekonomian yang tercermin pada suatu negara dalam bentuk pendapatan per kapita. Tentu saja, di zaman modern ini perekonomian berkembang relatif pesat. Akan tetapi, setiap negara akan dihadapkan pada permasalahan dalam perekonomiannya. Seperti yang terjadi di negara Indonesia contohnya seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain sebagainya.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia di sebabkan karna kurangnya kualitas SDM. Oleh karna itu, diperlukan strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia agar

perekonomian semakin canggih. Upaya untuk meningkatkan perekonomian salah satunya ialah dengan memperluas pengetahuan global setiap sumber daya manusia modern. Pelatihan berbasis ekonomi Pancasila diperlukan sebagai landasan upaya tersebut. Tujuan dari upaya tersebut diantaranya untuk lebih memperdalam dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dibidang prekonomian. Hal ini berdasarkan prinsip nasional sehingga menarik untuk dikaji bersama.

Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai prinsip kekeluargaan dan gotong royong agar generasi mendatang dapat mengenali jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Kemudian kita bisa mengamalkannya secara langsung dan hakikat nilai-nilai luhur tersebut akan senantiasa menjadi pedoman bangsa Indonesia. Kelangsungan hidup Pancasila akan terancam jika dasar-dasar negara dalam konstitusi dan rancangannya tidak dijadikan landasan pengukuran dan acuan pemikiran, pengambilan kebijakan, dan perilaku masyarakat, disisi lain gempuran nilai-nilai global terus merugikan negara kita. (Kurniawan & Lahir, 2017).

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. dengan menggunakan pendekatan literature dengan pembahasan yang diperoleh melalui beberapa dokumen seperti artikel jurnal, buku, dan dokumen kebijakan pemerintah yang sudah diadakan pengelitan sebelumnya. Hasil dari pengumpulan datadari berbagai sumber ini, penulis memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait isu yang akan dibahas pada artikel ini.

Dengan metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan literature penulis tidak perlu melakukan wawancara atau observasi langsung. Tapi metode ini mencari dan mengkaji data-data dari berbagai sumber dalam permasalahan tersebut. Dan metode ini memberikan gambaran yang lebih mandalam untuk penulis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Penelitian

- a. Perekonomian Masyarakat Indonesia.
- b. Masalah yang perekonomian Masyarakat Indonesia.
- c. Data perekonomian pada tahun 2014 sampai 2020.
- d. Faktor yang mempengaruhi perubahan ekonomi.
- e. Pertumbuhan teknologi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Masyarakat.
- f. Permasalahan ekonomi yang melanggar undang-undang dan nilai Pancasila.
- g. Undang-undang perlindungan konsumen tahun 1999.

- h. Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan.
- i. Peraturan menteri perdagangan nomor 18 tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan dilarang impor.
- j. Strategi penanganan penggunaan ekonomi digital agar tidak terlepas dari nilai Pancasila
- k. Implementasi strategi untuk menangani penggunaan ekonomi digital pada masyarakat.

Perekonomian merupakan kebutuhan setiap masyarakat dalam memenuhi dan kebutuhan sehari-hari. Perekonomian dapat dicapai melalui berbagai kegiatan masyarakat antara lain pertanian, perdagangan, industri, dan lain-lain. Oleh sebab itu, keseharian masyarakat tidak terlepas dari kegiatan perekonomian. Sebab, perekonomian sendiri merupakan roda kehidupan yang terus berputar dan memandu masyarakat menuju perubahan menjadi lebih sejahtera.

Perekonomian sendiri dapat berubah sesuai kondisi lingkungan yang mana bisa memberikan dampak positif dan negative bagi perekonomian Masyarakat sendiri. Sebagaimana yang terjadi pada tahun 2019 sampai tahun 2020 terjadi pandemi Covid yang mana saat itu terjadi penurunan perekonomian yang sangat drastis. Masyarakat dan pemerintah melakukan banyak upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi. Salah satunya adalah para pengusaha yang memanfaatkan teknologi digital secara ekstensif untuk menjalankan bisnis mereka.

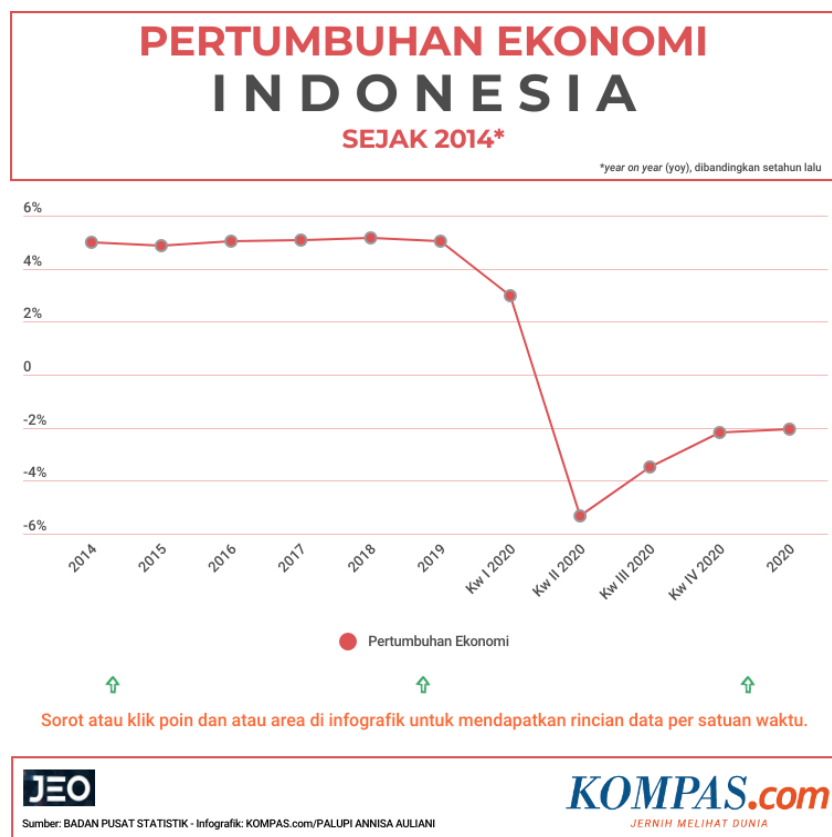
Tentu perkembangan teknologi saat ini mempengaruhi perkembangan perekonomian juga. Baik di bidang produksi sampai konsumsi. Penggunaan teknologi banyak situs dan platform yang membantu kegiatan jual beli sehingga menambah keuntungan bagi kedua belah pihak baik penjual selaku produsen dan pembeli selaku konsumen.

Berdasarkan pada data triwulan III tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,17%, lebih tinggi dibandingkan dengan periode tahun lalu sebesar 5,06%. Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 sebesar 5,07%, tertinggi sejak tahun 2014. Pada tahun 2015, Perekonomian Indonesia tampak rapuh. Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap USD terus berlanjut. Saat itu, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 4,88%. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II tahun 2018 sebesar 5,27% dibandingkan periode tahun lalu. Hanya terdapat sedikit peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Berdasarkan asumsi makroekonomi APBN 2018, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan sebesar 5,4% pada tahun 2018. Pada Senin (11 Mei 2018), BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III tahun 2018 melambat sebesar 5,17% dibandingkan triwulan sebelumnya Pertumbuhan ekonomi pada triwulan terakhir tahun 2018 diperkirakan berada di bawah ekspektasi APBN. Misalnya, Bank

Indonesia memperkirakan pertumbuhan Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2018 akan berada di kisaran bawah 5 persen. Namun fakta menunjukkan perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,17 persen pada tahun 2018. Ini merupakan pertumbuhan ekonomi terbesar di bawah kepemimpinan Jokowi.

Pada tahun 2018, investasi menyumbang 6,01%, ekspor 4,33%, konsumsi masyarakat 4,56%, konsumsi institusi swasta 10,79% dan impor 7,10%. Total produksi tahun 2018 adalah Rp56 juta, atau \$3.927 dengan kurs saat ini. Pada tahun pemilu 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02 persen. Perang dagang antara AS dan Tiongkok, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, dan volatilitas harga komoditas diyakini menyebabkan kinerja ekonomi lebih lemah dibandingkan kesuksesan tahun 2018.



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi produk domestik bruto (PDB) Indonesia triwulan II tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi, yaitu sebesar 5,4%. Produk domestik bruto riil mencapai Rp 2.923,7 triliun pada kuartal II 2022.

Uraian	Nilai* Q2 2022	Growth (%)		Share thd Total PDB (%)
		QtQ	YoY	
Pembentukan Modal Tetap Bruto	876,9	-3,7	3,1	30,0
Bangunan	646,9	-4,2	0,9	22,1
Mesin dan Perlengkapan	106,4	-1,8	16,3	3,6
Kendaraan	47,4	-4,8	7,0	1,6
Peralatan lainnya	13,3	-8,3	-4,3	0,5
<i>Cultivated Biological Resources</i>	41,9	-5,9	3,7	1,4
Produk Kekayaan Intelektual	21,0	17,5	6,9	0,7
PDB	2.923,7	3,7	5,4	100,0

Sumber: Badan Pusat Statistik

*dalam triliun Rp (ADHK)

Gambar 2. Tabel Pembentukan Modal Tetap Bruto.

Sumber pertumbuhan ekonomi terbesar dari sisi pengeluaran adalah konsumsi rumah tangga pribadi yang meningkat sebesar 5,5% (dibandingkan tahun sebelumnya).

Tahun 2017 – Triwulan II/2022 (persen, YoY)											
	2017	2018	2019	2020	2021:1	2021:2	2021:3	2021:4	2022:1	2022:2	
Produk Domestik Bruto	5,1	5,2	5,0	-2,1	-0,7	7,1	3,5	5,0	5,0	5,4	
Konsumsi Rumah Tangga	4,9	5,1	5,0	-2,6	-2,2	6,0	1,0	3,6	4,3	5,5	
Konsumsi LNPR	6,9	9,1	10,6	-4,3	-3,7	4,0	2,8	3,3	6,0	5,0	
Konsumsi Pemerintah	2,1	4,8	3,3	2,0	2,5	8,1	0,6	5,2	-7,7	-5,2	
PMTB	6,2	6,6	4,5	-5,0	-0,2	7,5	3,8	4,5	4,1	3,1	
Ekspor Barang dan Jasa	8,9	6,6	-0,5	-8,1	6,9	31,5	29,2	29,8	16,2	19,7	
Impor Barang dan Jasa	8,1	11,9	-7,1	-16,7	4,4	31,8	29,9	29,6	15,0	12,3	
Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan	3,9	3,9	3,6	1,8	3,4	0,5	1,4	2,3	1,1	1,4	
Pertambangan dan Penggalian	0,7	2,2	1,2	-2,0	-2,0	5,2	7,8	5,2	3,8	4,0	
Industri Pengolahan	4,3	4,3	3,8	-2,9	-1,4	6,6	3,7	4,9	5,1	4,0	
Industri Pengolahan Nonmigas	4,9	4,8	4,3	-2,5	-0,7	6,9	4,1	4,6	5,5	4,3	
Listrik dan Gas	1,5	5,5	4,0	-2,3	1,7	9,1	3,9	7,8	7,0	9,3	
Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, Daur Ulang	4,6	5,6	6,8	4,9	5,5	5,8	4,6	4,1	1,3	4,4	
Konstruksi	6,8	6,1	5,8	-3,3	-0,8	4,4	3,8	3,9	4,8	1,0	
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	4,5	5,0	4,6	-3,8	-1,3	9,5	5,2	5,6	5,7	4,4	
Transportasi dan Pergudangan	8,5	7,1	6,4	-15,1	-13,1	25,1	-0,7	7,9	15,8	21,3	
Akomodasi dan Makan Minum	5,4	5,7	5,8	-10,3	-7,3	21,6	-0,1	4,9	6,6	9,8	
Informasi dan Komunikasi	9,6	7,0	9,4	10,6	8,7	6,9	5,5	6,2	7,1	8,1	
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,5	4,2	6,6	3,3	-3,0	8,3	4,3	-2,6	1,6	1,5	
Real Estate	3,6	3,5	5,8	2,3	0,9	2,8	3,4	3,9	3,8	2,2	
Jasa Perusahaan	8,4	8,6	10,3	-5,4	-6,1	9,9	-0,6	0,9	6,0	7,9	
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,0	7,0	4,7	0,0	-2,3	10,0	-9,9	1,0	-1,5	-1,7	
Jasa Pendidikan	3,7	5,4	6,3	2,6	-1,5	5,9	-4,4	0,7	-1,7	-1,2	
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,8	7,2	8,7	11,6	3,4	11,7	14,1	12,2	4,4	6,5	
Jasa lainnya	8,7	9,0	10,6	-4,1	-5,2	12,0	-0,3	3,4	8,2	9,3	
PDB Harga Berlaku (Rp Triliun)	13.590	14.839	15.833	15.438	3.971,2	4.176,4	4.325,2	4.498,0	4.513,0	4.919,9	
PDB Harga Konstan (Rp Triliun)	9.913	10.426	10.949	10.723	2.684,2	2.772,9	2.815,9	2.845,9	2.818,6	2.923,7	

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 3. Tabel Pertumbuhan Ekonomi.

Sebagaimana yang tadi dijelaskan diatas bahwsanya teknologi sekarang sangat diperhatikan dalam bidang ekonomi. Ekonomi digital kini menjadi salah satu perhatian ekonomi dunia. Adaptasi teknologi kedalam aktivitas ekonomi mampu ruang berinteraksi yang lebih luas dan flrksibel. Akses digital yang kian menyebar juga membuat berbagai aktivitas ekonomi mampu dilakukan oleh berbagai flatfom kalangan tanpa keterbatasan. Akan tetapi hal ini sering terjadi penipuan antara penjual dan pembeli. Makadaripada itu perlu adanya kebijakan pemerintah bagi pengguna.

Terdapat beberapa aspek hukum perlindungan konsumen menyangkut perbuatan-perbuatan yang dilarang dari badan usaha dan tanggung jawab badan usaha, diatur dalam Pasal 8 tahun 1999 dan Pasal 19 sampai 28 tahun 1999 mengenai aspek perbuatan yang dilarang dan aspek pertanggungjawaban.

Oleh karena itu masyarakat maupun pemerintah harus tetap berdasarkan undang undang dan pancasila dalam menjalankan prekonomian salah satunya bidang perdagangan. Terdapat UU Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 yang memuat pengaturan perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, standardisasi, perdagangan melalui system elektronik, perlindungan dan pengamanan perdagangan, penguatan koperasi dan UMKM, serta pengembangan ekspor. Kerja sama perdagangan internasional, system informasi perdagangan, fungsi dan lembaga pemerintah di bidang perdagangan, Komisi Perdagangan Nasional, pemantauan dan investigasi.

Seiring berkembangnya teknologi perdagangan antar Negara atau ekspor impor sangat mudah sekali untuk diakses. Dalam hal ini juga sering terjadi penyeludupan barang- barang ilegal baik keluar atau masuk karna tidak ingin terkena pajak atau memang barang itu dilarang untuk ekspor dan impor. Oleh karena itu, Menteri Perdagangan RI telah menerbitkan Peraturan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Larangan Ekspor dan Larangan Impor Produk.

Barang merupakan suatu benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik mungkin atau mungkin tidak dibelanjakan dan dapat ditukar, digunakan atau dieksploitasi oleh konsumen atau badan komersial. Peraturan ini mengadung barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Yang mana si eksportir itu tidak boleh mengekspor barang- barang tersebut dan importer pun dilarang untukn mengekspor barang yang tercantum pada peraturan tersebut. Dan jika eksportir dan importir melanggar aturan tersebut maka akan dikenkan sanksi sesuai ketentuan perundangundangan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Jadi pada dasarnya, kegiatan ekspor dan impor merupakan salah satu implementasi perekonomian. Perkembangan yang terjadi dalam kegiatan ekspor dan impor akan selalu dipengaruhi perundang-undangan. Karena berada di Indonesia, seluruh kegiatan didasari oleh undang-undang. Dengan adanya undang-undang yang berlaku, menjadikan implementasi perekonomian tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan. Bahwasannya, perkembangan ekonomi dari tahun ke tahun di Negara Indonesia mengalami perubahan. Perubahan terjadi dari pengimplementasian masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Implementasi yang berubah ke masa modern menjadi sebuah sesuatu yang perlu diperhatikan. Maka dari itu adanya jurnal ini bermaksud mengembangkan penelitian yang dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian serupa.

Dalam era modern, implementasi perekonomian tetap perlu mempunyai dasar didalamnya. Dasar tersebut adalah perundang-undangan. Terjadinya inflasi dan deflasi adalah hal yang wajar. Karena seiring berjalannya waktu, kehidupan selalu menghadapi perubahan. Namun, usaha inflasi yang stabil sangat dianjurkan. Dalam pengimplementasian perekonomian di era modern Indonesia sudah seharusnya disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2017). Ekonomi pembangunan. UPP STIM YKPN.
- Aulawi, A. (2020). Penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 sebagai strategi kebijakan pajak pemerintah Indonesia dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 terhadap keuangan negara. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 110–132.
- Ayunda, S., Hasanah, T. U., Ariska, Y. A., & Fitriono, R. A. (2022). Strategi meningkatkan pengembangan ekonomi di era modern berbasis Pancasila. *Gema Keadilan*, 9(2).
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Indonesia 2021*. BPS.
- Bank Indonesia. (2020). *Laporan perekonomian Indonesia 2020*. Bank Indonesia.
- Deputi Bidang Ekonomi. (2021). *Perkembangan ekonomi Indonesia dan dunia triwulan I tahun 2021*. Kementerian PPN/Bappenas, 1, 18–102.
- Dumairy. (2018). *Perekonomian Indonesia*. Erlangga.
- Firdausy, K. A. (2023). *Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor terhadap usaha mikro kecil menengah: Studi kasus thrift shop di Solo Raya* [Doctoral dissertation, Universitas Sebelas Maret].

- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020–2024. Bappenas.
- Mubyarto. (2017). Sistem dan moral ekonomi Indonesia. BPFE.
- Nizar, M. A. (2017). Peran ekonomi digital terhadap ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 1(2), 45–58.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Setiawan, A., & Mahyuni, L. P. (2020). Digitalisasi UMKM di era industri 4.0. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 16(2), 98–110.
- Sukirno, S. (2019). Makroekonomi teori pengantar (Edisi ke-3). RajaGrafindo Persada.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2021). *Economic development* (13th ed.). Pearson.